

## **Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pulau Jawa 2016 - 2020**

**Jihan Safitri<sup>a\*</sup>**

<sup>abc</sup>Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

\* Corresponding author: [safitrijihan5@gmail.com](mailto:safitrijihan5@gmail.com)

---

### **Artikel Info**

#### *Article history:*

Received 09 Maret 2022

Revised 10 Maret 2022

Accepted 10 Mei 2022

Available online 31 Mei 2022

---

**Keyword:** Desentralisasi Fiskal ; Produk Domestik Regional Bruto

JEL Classification ; 040 ; N90 ; E62

---

### **Abstract**

*This study aims to study the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Java Island in 2016-2020. Tax reform, implemented since Law no. 28 of 2009 which has been able to encourage local authorities to improve justice between regions so that regional inequality does not occur. This study uses multiple regression analysis, namely panel data regression with 5 samples of provinces on the island of Java, the results show that the development of the ratio of regional independence, regional investment and regional expenditures increases. Then, for the comparison of the ratio of regional independence, regional investment and regional expenditures have a significant positive relationship with Java Island*

---

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, otonomi daerah dan desentralisasi memelopori reformasi, dan sejak reformasi tahun 1998, sistem pemerintahan Indonesia ditata ulang menjadi sistem pemerintahan desentralisasi (Noviantoro, 2009) dari anggaran keuangan (anggaran publik). Karena pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, mereka juga perlu meningkatkan pendapatan daerahnya untuk mendukung kegiatan yang memberikan pelayanan publik (Kurniawan, 2017). Oleh karena itu, menurut konsep *money follows function*, semakin besar fungsi terlokalisasi maka semakin banyak pula dana yang akan disalurkan ke daerah (Subiyantoro, 2016). Artinya, memberikan kewenangan keuangan kepada daerah berdasarkan pembagian urusan yang diberikan kepada daerah itu sangat diperlukan. Dengan kata lain, kewenangan tersebut dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tugas pemerintah pusat disini ialah menjamin sumber keuangan untuk pendelegasian wewenang tersebut. Desentralisasi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mengefisienkan pengeluaran pemerintah daerah, untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah seperti pembangunan fasilitas umum (Kusuma, 2016). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di pulau jawa menunjukkan hasil yang baik, namun hasil yang terbaik belum tercapai. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dana tersebut berasal dari potensi ekonomi daerah dan transfer yang disediakan oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi modalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat (Kusuma, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Priyo, 2012) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Penelitian (Noviantoro, 2009) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai CR sebesar 16,603. Hasil ini menunjukkan bahwa besaran rencana pembangunan ekonomi secara keseluruhan untuk menilai pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besar kecilnya PAD. Penelitian yang dilakukan (Situngkir, 2014) penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh terpengaruh setelah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, meningkat sebesar 0,129% (persentase) dibandingkan sebelum penerapan kebijakan desentralisasi. Setelah desentralisasi, jika DBH, DAU dan DAK meningkat 1%, maka laju pertumbuhan ekonomi masing-masing adalah 0,149%, 0,0859% dan 0,52279%, dan nilai konstanta adalah 3,3200832, artinya jika DBH, DAU Dengan DAK tidak berubah, laju pertumbuhan ekonomi adalah 3,3%.

Tetapi pada penelitian (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011) menyimpulkan bahwa hubungan PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan PAD tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat maupun kesejahteraannya. Pada penelitian (Situngkir, 2014) penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dengan indikator pengeluaran dan indikator penerimaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Sementara itu, indikator pendapatan tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Perimbangan, dan indikator otonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Beberapa penelitian mengenai desentralisasi fiskal tersebut memiliki berbagai implikasi untuk wilayah yang lebih maju. Diharapkan dengan menjadikan 5 Provinsi di Pulau Jawa sebagai sampel pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaannya di setiap daerah. Penerimaan pemerintah yang paling besar ialah berasal dari penerimaan pajak. Sehingga dapat mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap Makroekonomi di Pulau Jawa Tahun 2016 - 2020, akan tetapi harus ditekankan pada perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah orang yang berkaitan dengan merumuskan kebijakan fiskal (Subiyantoro, 2016). Sehingga disini dari enam provinsi yang ada di pulau jawa penelitian ini tidak memilih provinsi banten karena banten adalah kota satelit dimana kota satelit belum bisa di ukur pendapatan asli daerahnya karena sebagian besar warga banten masih menumpukkan pekerjaannya di DKI Jakarata jadi semua kebijakan yg ada di Jakarta sangat mempengaruhi kondisi perekonomian kota banten. Dengan di lihat dari tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang pada dasarnya ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu di sisi lain akan terjadi kesejahteraan masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan. Akan tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat

mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di berbagai Provinsi Pulau Jawa.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian menggunakan Rasio Kemandirian Daerah, Investasi Daerah, dan Belanja Daerah sebagai variable independen dan dependen. Kemudian penelitian menggunakan 5 provinsi. Propinsi Banten tidak digunakan dalam penelitian ini karena Banten merupakan kota satelit. Dimana kota satelit belum bisa di ukur pendapatan asli daerahnya karena sebagian besar warga Banten masih menumpukkan pekerjaannya di DKI Jakarata jadi semua kebijakan yg ada di Jakarta sangat mempengaruhi kondisi perekonomian kota Banten (Anggita, 2018).

Dengan di lihat dari tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang pada dasarnya ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu di sisi lain akan terjadi kesejahteraan masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan. Kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur pada kondisi ekonomi (Agustina & Wijaya, 2013). Akan tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di berbagai Provinsi Pulau Jawa. Dari beberapa permasalahan diatas maka perlu adanya penelitian yang melibatkan rasio kemandirian daerah, belanja daerah, investasi daerah. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara rasio kemandirian daerah, belanja daerah, dan investasi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Sasaran pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu tujuan tertentu atas sesuatu yang akan dibuktikan secara objektif. Menurut (Zulfiah & Susilowibowo, 2014) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: "Objek penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai seseorang atau kegiatan, dengan variabel-variabel tertentu, yang dapat dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan". Beberapa objek dari penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Daerah, Investasi Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Pulau Jawa. Menurut (Saputra & Riyadi, 2017) Populasi adalah bidang umum objek/subyek yang diidentifikasi oleh peneliti memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu 5 provinsi yang ada di pulau Jawa. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu 5 Provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) yang aktif menerbitkan laporan keuangan tahunan selama tahun 2016 - 2020.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dokumentasi. Penelitian dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengklasifikasikan bahan-bahan dokumenter yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian. Data yang dikumpulkan adalah kemandirian daerah, investasi daerah, belanja daerah, dan rasio PDRB.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Secara khusus, metode analisis dijelaskan sebagai berikut. Analisis kuantitatif berupa analisis regresi berganda (multiple regression analysis) berkaitan dengan variabel dependensi, yaitu variabel dependen yang digunakan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas). Pada variabel ini digunakan untuk tujuan kedua yaitu menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode regresi data panel (*pooled data*) yang mana akan dipilih pendekatan yang terbaik dari *common effect*, *fixed effect*, *random effect* dengan cara menggunakan suatu uji regresi data panel yaitu *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier*. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan dan pengaruh variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, maka terdapat model persamaan sebagai berikut :

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 RKD_{it} + \beta_2 ID_{it} + \beta_3 BD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

- $PE_{it}$  : Pertumbuhan Ekonomi PDRB perkapita tiap Provinsi atas dasar harga konstan (Jutaan Rupiah)
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi
- $RKD_{it}$  : Jumlah Rasio Kemandirian Daerah Provinsi  $i$  pada tahun  $t$  (Jutaan Rupiah)
- $ID_{it}$  : Jumlah Investasi Daerah Provinsi  $i$  pada tahun  $t$
- $BD_{it}$  : Jumlah Belanja Daerah Provinsi  $i$  pada tahun  $t$
- $\varepsilon$  : *error term*

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Pohan & Yuliana, 2021) yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect*. Kemudian menentukan model regresi data panel yaitu *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Regresi Data Panel

Metode analisis data dapat menggunakan tiga metode dalam regresi data panel yaitu *Common Effects*, *Fixed Effects*, dan *Random Effects* sebagai berikut:

#### a. Model Common Effect

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Common Effect**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87.48865	104.9009	0.834012	0.0001
RKD	1.217630	0.024441	-2.100462	0.0000
Investasi Daerah	0.252597	0.084760	2.980139	0.0003
Belanja Daerah	0.510860	0.084254	6.063339	0.0000
R-Squared	0.484380			

Bila dilihat dari hasil estimasi model *common effect* dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.484380 atau 48% yang artinya 48% variabel tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel rasio kemandirian daerah, investasi daerah, dan belanja daerah. Sedangkan sisanya 52% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

**b. Model Fixed Effect.**

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Fixed Effect**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87.48865	116.5908	0.750391	0.4633
RKD	-0.051338	0.027165	-0.589860	0.0000
Investasi Daerah	0.252597	0.094206	2.681336	0.0010
Belanja Daerah	0.510860	0.093643	5.455401	0.0000
R-Squared	0.559770			

Bila dilihat dari hasil estimasi model *fixed effect* dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.559770 atau 55% yang artinya 55% variabel tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel rasio kemandirian, investasi daerah dan belanja daerah. Sedangkan sisanya 45% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

**c. Model Random Effect**

**Tabel 3. Hasil Analisa Regresi Data Panel Model Random Effect**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.410043	116.5908	0.750391	0.4613
RKD	1.051338	0.027165	-0.589860	0.0002
Investasi Daerah	-0.252597	0.094206	2.681336	0.0010
Belanja Daerah	-0.460860	0.093643	5.455401	0.0000
R-Squared	0.684380			

Bila dilihat dari hasil estimasi model *random effect* dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.684380 atau 68% yang artinya 68% variabel rasio kemandirian, investasi daerah dan belanja daerah . Sedangkan sisanya 32% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kemudian dilakukan Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel dengan menggunakan tiga uji yaitu *Uji Chow*, *Uji Hausman* dan *Uji LM*.

**a. Uji Chow**

**Tabel 4. Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	35.463029	(9.57)	0.0160
Cross-section Chi square	132.088784	9	0.0000

Berdasarkan uji *Chow*, diperoleh Prob. F = 0,0160. Nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga diputuskan untuk menerima  $H_0$  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model *common effect* lebih tepat digunakan daripada model *Fix Effect*.



**b. Uji Hausman**

**Tabel 5. Uji Hausman**

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.431985	3	0.0001

Berdasarkan uji *Hausman*, diperoleh Prob.F = 0,0001. Nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga diputuskan untuk menolak  $H_0$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan daripada *model random effect*.

**c. Uji LM (Lagrange Multiplier)**

**Tabel 6. Uji LM (Lagrange Multiplier)**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	109.0607 (0.1006)	4.348940 (0.0370)	113.4097 (0.0016)

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier, diperoleh probabilitas dari *Breusch Pagan* = 0,1006. Nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga diputuskan untuk menerima  $H_0$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model *common effect* lebih tepat digunakan daripada model *random effect*.

Berdasarkan hasil dari tiga uji untuk pemilihan model terbaik, yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM) . Dapat diketahui bahwa uji chow memilih model CE, uji hausman memilih model FE dan uji LM memilih model CE. Sehingga dapat diputuskan bahwa pada penelitian ini model *common effect* merupakan model terbaik dikarenakan lebih dominan pada saat diuji untuk pemilihan model terbaik.

**Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Investasi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa.**

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) yang dilakukan menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah, Investasi Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh secara serentak terhadap PDRB di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Najib et al., 2017) dimana variabel Investasi Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap PDRB. Penelitian lainnya yang mendukung adalah yaitu (Yudha et al., 2016) dimana dinyatakan bahwa variabel Kemandirian, Belanja Langsung dan Tidak Langsung, Investasi Daerah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB.

**Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa**

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Pajak Daerah dan PDRB di Pulau Jawa menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,128012 koefisien regresi sebesar 1,217630 dan nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Rasio Kemandirian Daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Hayford (2016) juga menunjukkan bahwa adanya perubahan

pada kebijakan fiskal berupa penurunan PAD dapat menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0.54 dollar, yang kemudian akan berdampak pula pada kenaikan pada pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain bahwa hubungan antararasio kemandirian dengan pertumbuhan ekonomi adalah signifikan positif, sesuai dengan teori yang dikemukakan Keynesian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kundhani, 2015) bahwa pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ialah signifikan dan memiliki hubungan yang negatif, dimana apabila ada penurunan pajak sebesar 2.5 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3 persen.

### **Pengaruh Investasi Daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa**

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Investasi Daerah dan PDRB di Pulau Jawa menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,190507 koefisien regresi sebesar 0,252597 dan nilai probabilitas 0,0003 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara variabel Investasi Daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan teori Agregat Output Keynesia bahwa komponen perekonomian tiga sector terdiri dari konsumsi, investasi dan belanja pemerintah.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa**

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Belanja Daerah dan PDRB di Pulau Jawa menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,508490 koefisien regresi sebesar 0,510860 dan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Pulau Jawa. Hal ini didukung oleh Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yudha et al., 2016), bahwa apabila belanja pemerintah turun maka pertumbuhan ekonomi akan turun, dan ketika belanja pemerintah naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Bajo-Rubio menyatakan bahwa adanya pemotongan jumlah belanja pemerintah memiliki dampak yang besar terhadap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi. Sama halnya dengan hasil dari penelitian ini dimana apabila ada kenaikan pada belanja daerah, justru akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.2324. Hal ini dapat disebabkan karena belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk belanja yang kurang produktif, contohnya seperti belanja bangunan dan kantor pemerintah daerah ataupun belanja mobil dinas. Hal ini yang menyebabkan adanya kenaikan pada belanja daerah tidak memiliki dampak yang positif terhadap kenaikan perekonomian di daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penelitian tentang desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pulau Jawa 2016 – 2020 dengan pemilihan hasil model regresi terbaik maka di dapat bahwa model *common effect* lebih sesuai. Bila dilihat dari nilai koefisien rasio kemandirian menandakan adanya pengaruh positif dan signifikan. Variabel Investasi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

pertumbuhan ekonomi. Variabel investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Variabel belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, & Wijaya, A. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi return saham. *Jurnal Agribisnis*, 2(2), 183–201.
- Anggita, C. (2018). *Kelayakan kecamatan samarinda seberang, palaran dan loajan ilir menjadi kota satelit. Desember 2015.*
- Kundhani, E. Y. (2015). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah. *Universitas Kristen Satya Kencana*, 32. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8495/6/T2\\_092014801\\_Full text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8495/6/T2_092014801_Full text.pdf)
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11. <http://eprints.umm.ac.id/57958/7/Kusuma - Fiscal Decentralization Fund Transfers Economic Growth Panel Data.pdf>
- Najib, S. M., Ariff, S. M., & Anuar, M. N. (2017). The buoyancy of major direct tax categories: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 31–50.
- Noviantoro, D. (2009). *Sekolah pascasarjana universitas sumatera utara medan 2011.* 1–149.
- Pohan, A. A., & Yuliana, L. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 792–800. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1044>
- Priyo, A. H. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*, 02(05), 1–121.
- Saputra, M. R., & Riyadi, S. (2017). Sistem Informasi Populasi dan Historikal Unit Alat-Alat Berat Pada PT . Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 6(2), 1–6.
- Situngkir, F. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 17(3), 125–137.
- Subiyantoro, P. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan. *Digital Repository Universitas Jember*, 1–111. <http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79209/Putut Subiyantoro.pdf?sequence=1>
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Yudha, D. M. A. K., Made Gede Wirakusuma, & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dengan moderasi



akuntabilitas pelaporan keuangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 2461–2490.

Zulfiah, F., & Susilowibowo, J. (2014). Pengaruh inflasi, BI rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(3), 759–770.